

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar MBS(Manajemen Berbasis Sekolah)

1. Pengertian MBS

Sebagian besar kewenangan pada pemerintahan pusat telah dilimpahkan pada pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan UU no 32 th 2004.¹ Kewenangan yang dilimpahkan tersebut salah satunya pada kewenangan lembaga pendidikan. Sehingga, lembaga pendidikan ini memiliki perubahan dalam penyelenggaraanya yang semula pada penyelenggaraan pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi.² Adanya perubahan tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

Perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi menuju ke desantrilisasi melalui penerapan manajemen berbasis sekolah.³ Manajemen berbasis sekolah ini sudah diterapkan di Amerika dengan sebutan school based manajement. Berdasarkan istilah manajemen berbasis sekolah ini terbagi menjadi tiga kata, yaitu: manajemen, berbasis, dan sekolah.

Masing-masing dari ketiga kata tersebut memiliki artian, yaitu: 1) manajemen, pengelolaan semua sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. 2) berbasis, memiliki artian sebagai dasar. 3) sekolah, sebagai

¹ Badan Pembinaan Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Kemenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, (20 Februari 2013), 56

² Sufriyati dan Sobirin Malian, *Problem Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 3, (Yogyakarta: Uniersitas Islam Indonesia, Desember 2019), 306.

³ Slameto, *Strategi Implementasi manajemne Berbasis Sekolah (MBS) dengan Profesional*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 9.

tempat berlangsungnya KBM.⁴ MBS dapat diartikan sebagai pengelolaan semua sumber daya yang berdasarkan pada proses belajar dan mengajar.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Ana Widyastuti, 2020) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini berarti, MBS itu merupakan kegiatan yang melibatkan semua warga sekolah mulai dari peserta didik, wali murid, masyarakat, tenaga kependidikan dan kependidikan.

Manajemen berbasis sekolah adalah suatu kebijakan pengambilan keputusan yang semula berpusat dari pemerintah pusat (sentralik) ke pemerintah daerah (desantrilik), yang melibatkan kepek, tenaga pendidik dan kependidikan, orangtua wali.⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa, MBS memiliki kewenangan yang di mana lembaga pendidikan diberikan keleluasan dalam mengelola keuangan, teknologi, metode, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa MBS memiliki definisi, yaitu: adanya otonomi yang memberikan keleluasan kepada pihak lembaga pendidikan dalam mengelola sekolahnya dengan melibatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan

⁴ Alif Achadah, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Ilmiah, Vol. 4, No. 2, (Malang: Universitas Islam Raden Rahmat, Desember 2019), 83.

⁵ Alif Achadah, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Konsep Dasar dan Implementasinya Pada Satuan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Ilmiah, (Desember 2019), Vol. 4, No. 2, 81.

tujuan sekolah dan dapat dijadikan sebagai cara dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.

2. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan utama dari MBS adalah peningkatan mutu pendidikan dengan cara memberikan otonomi kepada sekolah untuk berinisiatif meningkatkan manajemen sekolah serta kurikulum dan pembelajaran. Sobahi, Hanafiah dan Suhana⁶ mengemukakan pendapat bahwa tujuan MBS adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum.⁷

Lebih rinci tujuan MBS dikemukakan dalam buku MBS SMA yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud⁸ adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama
- c. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah

⁶ Suhana, 2010

⁷ Prihantini,dkk. *Manajamen Berbasis Sekolah*. (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 7

⁸ Kemendikbud, 2018

- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang dicapai⁹

Berdasarkan tujuan MBS tersebut maka setelah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah (Mulyasa,2007:24). Jadi dapat diambil kesimpulan orientasi utama dari tujuan MBS pada intinya adalah budaya mutu yang diharapkan dapat tercipta dalam tata kelola setiap substansi manajemen sekolah. Untuk mewujudkan budaya mutu, sekolah perlu menempuhi strategi yang efektif.

3. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Penerapan MBS memiliki berbagai manfaat bagi pihak sekolah. Hal ini disebabkan adanya otonomi daerah dalam pemberian kebebasan dan leluasaan pada pihak sekolah¹⁰, serta memiliki tanggung jawab. Kebebasan tersebut, meliputi: kebebasan dalam penyusunan kurikulum, program sekolah, visi, misi, tujuan, pembuatan logo sekolah, dan lain-lain

Manfaat dalam penerapan MBS, yaitu: 1) memperkenankan pada guru-guru yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan yang diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran. 2) memperkenankan semua sumber daya yang ada dalam pengambilan keputusan. 3) pihak sekolah lebih leluasa dalam pengarahan pada kreativitas dan fleksibilitas untuk

⁹ Ibid, 8

¹⁰ Ahmad Zaini Aziz, Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif, Peningkatan Mutu, Pendidikan Madrasah, *Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawuj*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), Vol. 8, No. 1, 81

mendesain program. 4) mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan lembaganya¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai manfaat dari penerapan MBS adalah sekolah atau lembaga pendidikan memiliki kebebasan dan leluasaan dalam mengatur sekolah yang disertai tanggung jawab. Sehingga, pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh semua sumber daya, hal ini menandakan kepartisipasian semua tenaga pendidik dan kependidikan, serta masyarakat dan dapat mengembangkan kreatifitas dalam mendesain program sekolah. Pengambilan keputusan tersebut, meliputi: dalam menetapkan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi dalam meningkatkan mutu sekolah.

4. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Otonomi yang diberikan kepada sekolah, sehingga sekolah dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, partisipasi dan mutu serta memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini, dapat dikatakan bahwa MBS memiliki karakteristik dalam penerapannya. Karakteristik itu sendiri memiliki artian sebagai sifat atau ciri dalam membedakan sesuatu dari yang lainnya.

Karakteristik dalam penerapan MBS yaitu input, proses, dan output. Pada pendekatan sistem tersebut, maka dapat dijabarkan, sebagai berikut:

a. *Input* pendidikan

Input pendidikan harus memiliki kejelasan mengenai tujuan dan sasaran mutu, segala sumber daya harus ada dan juga siap, memiliki

¹¹ Irjus Indrawan, *Pengantar Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta:Qiara Media,2022),23

staf yang berkompeten tinggi, dan memiliki harapan prestasi yang tinggi.¹²

b. Proses pendidikan

Proses pendidikan ini meliputi adanya proses pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan, adanya wewenang atau kemandirian yang dimiliki oleh pihak sekolah, lingkungan pendidikan yang aman dan tertib, memiliki hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan masyarakat, pihak sekolah selalu mengevaluasi dan selalu memperbaiki secara terus menerus, dan pihak sekolah harus akuntabilitas dan memiliki transparansi management

c. *Output* pendidikan (hasil)

Prestasi yang dihasilkan dengan adanya pembelajaran dan manajemen sekolah, hal ini disebut dengan output sekolah. Output sekolah dibedakan menjadi dua, yaitu prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik misalnya memenangkan lomba matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain yang di mana pemberian pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Sedangkan, prestasi non akademik misalnya memiliki prestasi olahraga, prestasi dalam bidang kesenian, dan lain-lain yang di mana pemberian pembelajaran dilakukan di luar kelas

Pada dasarnya karakteristik pada MBS adalah adanya kebebasan yang dimiliki oleh lembaga pendidik dalam menentukan sasaran dan tujuan harus jelas, memiliki staf dan harapan prestasi yang tinggi dan

¹² Dadang Darmawan, *Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bogor: SKTIP Muhamadiyah, 2019), 4-5

kompeten, memiliki keleluasan dalam meningkatkan mutu (kurikulum, kepegawaian, keungan, sarpras, dan perekrutan peserta didik). Hal tersebut, dapat disebut sebagai system yang berupa input-proses-output.¹³

5. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 27 disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Terdapat 5 (lima) prinsip pelaksanaan MBS antara lain:¹⁴

a) Kemandirian

Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerja sama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan peningkatan program sekolah.

¹³ Abdul Rahmat, *Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Perbaikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 48

¹⁴ Made Saihu, *Manajemen Berbasis Sekolah, Madrasah dan Pesantren*, (Tangerang Selatan:Namiya Press, 2020), 62

b) Kemitraan

Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sesuai kategori sekolah. pastikan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan bersifat sejajar.

c) Partisipasi

Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Tujuan utama peningkatan partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Upaya peningkatan partisipasi di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi sekaligus transparansi terhadap pemangku kepentingan.¹⁵

¹⁵ Ibid, 63

d) Keterbukaan

Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membangun keterbukaan kepada publik yaitu dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan serta menyampaikan laporan dari setiap program yang telah berjalan.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan dimana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.

B. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

1. Pengertian Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Kecakapan hidup (*life skill*) dapat diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu memecahkan permasalahan hidup secara wajar dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya

Menurut badan international WHO, life skill diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupannya secara efektif.¹⁶

Sementara Bernie dan Scally mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berhubungan baik secara individu, kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi situasi tertentu.

Malik Fajar mengatakan, *life skill* adalah kecakapan yang dibutuhkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. Sementara itu team Broad Base Education Depdiknas mendefinisikan kecakapan hidup (*life skill*) sebagai kecakapan yang dimiliki oleh seseorang agar berani dan mau menghadapi segala permasalahan kehidupan dengan aktif dan proaktif sehingga dapat menyelesaikannya kehidupannya.¹⁷

Dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup (*Life Skill Education*) adalah “pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vocational untuk bekerja atau usaha mandiri”.¹⁸

Darmaningtyas memberikan penjabaran mengenai kompetensi yang diartikan sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan sesuatu secara efektif. Dalam terminologi pendidikan,

¹⁶ Andy Suryadi, *Life Skill dalam Pembelajaran Sejarah*, (Klaten: Lakeisha, 2022), 8

¹⁷ Sutiah Cucu, *Landasan Pendidikan*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 51

¹⁸ UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, 46

kompetensi yang dimaksud adalah performa yang tampak pada kemampuan yang ditunjukkan (*observable*) dan terukur (*measurable*). Kecakapan hidup pada intinya lebih menekankan pada penguasaan kecakapan yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh mental yang memadai (*well being*) dan kompetensi bagi kelompok remaja dalam menghadapi kelompok kehidupan sehari-hari. Hampir semua profesional yang memiliki kajian dalam pengembangan pendidikan kecakapan hidup, setuju bahwa kecakapan hidup memiliki kaitan dengan kesehatan dan kegiatan sosial.¹⁹

Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali siswa dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang di dalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak siswa sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan.

2. Aspek-Aspek Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Menurut Asmani , pendidikan kecakapan hidup dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yaitu: a) Kecakapan Hidup General (*General Life Skill/GLS*) dan Kecakapan Hidup Spesifik (*Spesifik Life Skill/SLS*)²⁰

a. Kecakapan yang Bersifat Umum (*General Life Skills*)

Kecakapan hidup yang bersifat umum merupakan kecakapan yang

¹⁹ Takdir Muhammad, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 99

²⁰ Dumiyati, *Manajemen Kurikulum Program Ketrampilan Vokasional (Teori dan Implementasi)*, (Indramayu: CV. Andanu Abimata, 2020), 13

diperlukan oleh siapapun, baik yang bekerja, yang tidak bekerja dan yang sedang menempuh pendidikan. Kecakapan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Kecakapan personal

Kecakapan personal dapat diartikan sebagai kecakapan untuk mengenal diri yaitu suatu kemampuan berdialog yang diperlukan seseorang untuk dapat mengaktualisasikan jati diri dan menemukan kepribadiannya dengan cara menguasai serta merawat jiwa dan raga. Kecakapan personal ini meliputi:

a) Kesadaran diri sebagai hamba Allah SWT

Sebagai Makhluk ciptaan-Nya setiap manusia semestinya tau dan meyakini adanya Allah sang pencipta alam semesta, pengatur dan penentu peri kehidupan di dalamnya. Dalam hal ini manusia adalah makhluk yang terikat dengan berkesadaran diri bahwa Allah adalah pencipta dirinya, ketaatan beribadah, dan ketakwaan dalam mengemban amanatNya sebagai makhluk sosial.

b) Kesadaran akan potensi

Pada dasarnya kodrat kejadian (fitrah) manusia sebagai ciptaan Allah dilengkapi dengan berbagai potensi, Pembinaan kesadaran diri ini sering di sebut sebagai pendidikan karakter yang pembinaannya harus dilakukan sejak dini dan karakter ini akan wujud menjadi perilaku keseharian. Pembinaan kesadran potensi diri ini meskipun bersifat individual, namun perlu

dikembangkan dalam kerangka kebersamaan (sosial) dan didasarkan pada moral. Demikian siswa menyadari adanya perbedaan individu sebagai ketentuan Allah, perlunya saling membantu dan mengisi, serta menghargai sesama. Jadi kesadaran pengembangan potensi tersebut terbentuk seiring dengan peningkatan spiritual, dan aktualisasinya akan mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah, tahu kelebihan dan kekurangan, percaya diri, merasa cukup, dan bertindak tepat.

c) Kecakapan berfikir rasional

Islam menggambarkan bahwa salah satu keunggulan potensi insaniyah adalah akan untuk berfikir dan mempertimbangkan tindakannya secara cerdas. Kesadaran insani yang berupa kecerdasan akal ini merupakan anugrah yang tak terhitung nilainya. Alam dan seisinya serta kehidupan di dalamnya merupakan amanah Allah yang diberikan kepada manusia, disediakan sebagai fasilitas dan menantang hidupnya agar mampu menggali ilmu pengetahuan, mengolah dan mengambil manfaat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat demi meraih kesejahteraan dan mewujudkan kemaslahatan di dalamnya. Kecakapan ini untuk mendapatkan informasi, memproses materi, membuat keputusan dengan tepat dan memecahkan masalah dengan cara yang

bijaksana dan kreatif.²¹

2) Kecakapan Sosial

Manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain, dalam pergaulan inilah manusia dituntut untuk mempunyai kecakapan sosial agar terjadi keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Secara lebih terperinci berikut ini dikemukakan sejumlah kecakapan sosial yang penting dikembangkan dalam proses pembelajaran yaitu meliputi kompetensi bekerjasama dalam kelompok, menunjukkan tanggung jawab sosial, mengendalikan emosi, dan berinteraksi dalam masyarakat dan budaya lokal serta global. Kecakapan sosial ini dapat diwujudkan berupa :

a) Kecakapan komunikasi

Kecakapan berkomunikasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat tempat tinggal maupun tempat kerja, siswa sangat memerlukan kecakapan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam realitasnya komunikasi lisan ternyata tidak mudah dilakukan. Seringkali orang tidak dapat menerima pendapat lawan bicaranya, bukan karena isi atau gagasannya tetapi karena cara penyampaiannya yang kurang berkesan.

Dalam hal ini diperlukan kemampuan bagaimana memilih kata dan cara menyampaikan agar mudah dimengerti oleh lawan

²¹ Ibid, 17

bicara. Karena komunikasi secara lisan adalah sangat penting, maka perlu ditumbuh kembangkan kepada siswa. Lain halnya dengan komunikasi secara tertulis. Dalam hal ini diperlukan kecakapan bagai mana cara menyampaikan pesan secara tertulis dengan pilihan kalimat, kata-kata, tata bahasa dan aturan lainnya agar mudah dipahami orang atau pembaca lain. Berikut ini aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan yaitu: kecakapan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis ide/opini.

b) Kecakapan bekerjasama

Bekerja dalam kelompok atau tim merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sepanjang manusia hidup. Salah satu hal yang diperlukan untuk bekerja dalam kelompok adalah adanya kerja sama. Kemampuan bekerjasama perlu dikembangkan agar siswa terbiasa memecahkan masalah yang bersifat kompleks. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama adanya saling pengertian dan membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik, hal ini agar siswa terbiasa dan dapat membangun semangat komunitas yang harmonis. Kecakapan ini meliputi: Kecakapan bekerja dalam tim dan kecakapan sebagai pemimpin yang berempati merupakan hubungan kerjasama antara junior dan senior (bawahan dan atasan).

b. Kecakapan Hidup Spesifik (*Specific Life Skill*)

Merupakan kecakapan yang diperlukan seseorang untuk

menghadapi permasalahan pada bidang-bidang tertentu. Kecakapan ini meliputi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.

1) Ketrampilan akademik

Kecakapan akademik dapat disebut sebagai kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah. Kecakapan ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir pada *General Life Skills*. Jika kecakapan berfikir pada GLS masih bersifat umum, maka kecakapan akademik merupakan bagian yang lebih terfokus pada kegiatan yang bersifat akademik/keilmuan. Kecakapan ini lebih cocok untuk dikembangkan pada jenjang pendidikan menengah serta perguruan tinggi.²²

2) Kecakapan vokasional

Kecakapan vokasional disini adalah kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/ keterampilan yang meliputi keterampilan fungsional, keterampilan bermatapencarian seperti menjahit, kewirausahaan, bertani, beternak, otomotif, dan lain lain. Kecakapan ini lebih mengarah pada kecakapan pada bidang pekerjaan yang mengandalkan keterampilan psikomotorik dari pada kecakapan berpikir ilmiah.

Menurut Slamet kecakapan hidup dikategorikan menjadi dua, yaitu kecakapan dasar dan kecakapan instrumental/fungsional. Kecakapan dasar adalah kecakapan yang bersifat universal dan merupakan fondasi/pilar bagi peserta didik untuk bisa

²² Dumiyati, Op.cit, 19

mengembangkan kecakapan hidup yang bersifat instrumental/fungsional. Sedangkan kecakapan yang bersifat instrumental adalah kecakapan yang bersifat kondisional dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, situasi, dan harus diperbarui secara terus menerus sesuai dengan perubahan.

Pembagian aspek kecakapan hidup sebagaimana yang telah disebutkan, mempunyai maksud yang tidak jauh berbeda, kecakapan hidup yang bersifat umum sebagaimana kecakapan dasar merupakan kecakapan hidup yang menjadi fondasi yang diperlukan untuk mengembangkan kecakapan hidup yang lebih spesifik. Sementara cara penyampaiannya kepada peserta didik perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tingkat usia serta kebutuhan peserta didik di masyarakatnya. Oleh karena itu, prinsip belajar sepanjang hayat dan pendidikan seumur hidup sangat tepat diimplementasikan demi terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup.

c. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Konsep pendidikan *life skill* sangat tepat untuk menjadi perubahan baru dalam dunia pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional yang terkait dengan lulusan yang dinilai kurang kompeten serta belum mempunyai keterampilan yang memadai.

Program pendidikan keterampilan yang efektif bukan hanya efektif dalam pelaksanaan pengajaran praktik, melainkan juga pengajaran teori. Sebanyak mungkin, pembelajaran teori dihubungkan

dengan aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan nyata sehingga mereka menguasainya sebagai kecakapan hidup (*life skill*), baik kecakapan hidup dasar, kecakapan hidup umum maupun kecakapan operasional yang lebih tinggi.

Secara umum, tujuan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup adalah memfungsikan pendidikan sebagai wahana pengembangan fitrah manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah SWT untuk siap menjalani hidup serta menghadapi perannya dimasa yang akan datang.²³

Esensi pendidikan yang berorientasi pada *life skills* tidak lain merupakan usaha meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata, sebagai jembatan antara kegaitan di sekolah dengan kehidupan di masyarakat.

Adapun manfaat pendidikan kecakapan hidup ini bagi peserta didik secara umum adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan masalah hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang tangguh dan mandiri warga masyarakat maupun sebagai warga negara.

Jika hal tersebut benar-benar dapat tercapai, maka faktor ketergantungan lulusan terhadap lapangan kerja yang sudah ada dapat diturunkan, karena adanya kreativitas dan inisiatif dari lulusan yang tidak terpaku pada lapangan kerja tertentu, ini berarti bahwa produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap.

²³ Suranto, *Konsep Pendidikan Berbasis Life Skill (Pentingnya Life Skill dan Pendidikan Vokasi)*, (Semarang: Alprin: 2009), 14

C. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Upaya Mengembangkan *Life Skill* Peserta Didik

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam penerapan ataupun pelaksanaan.²⁴ Menurut Wahab, implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang dapat menuju terwujudnya tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, implementasi adalah sarana dalam melakukan tindakan yang memiliki dampak (akibat) terhadap sesuatu (dalam mencapai tujuan).

Implementasi dilaksanakan setelah adanya rancangan dalam bentuk perencanaan yang di mana telah disusun secara matang dan terperinci oleh seseorang atau organisasi tertentu. Menurut Usman, implementasi juga dapat dikatakan sebagai aktivitas, adanya suatu aksi, ataupun tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu aktifitas, tindakan, atau kegiatan yang di mana dapat dilakukan setelah adanya penyusunan dalam bentuk perencanaan yang telah dibuat secara terperinci dan dapat dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Empat langkah manajemen dalam pelaksanaan MBS sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry yang sering disebut POAC yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan)²⁵. dipaparkan sebagai berikut:

²⁴ Joko Pramono, *Implementasi dan Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, Oktober 2020), 1.

²⁵ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi dalam Akvitas Manajerial di Sekolah atau Madrasah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2020), 50

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Sagala perencanaan sekolah adalah proses menentukan sasaran alat, tuntutan-tuntutan, taksiran, pos-pos tujuan, pedoman, dan kesepakatan yang menghasilkan program- program sekolah yang terus berkembang . Perencanaan adalah suatu kegiatan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakkukan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga.²⁶ Adanya perencanaan supaya segala kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Hal ini ditegaskan pula oleh Terry bahwa, perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Perencanaan MBS yang meliputi kepala madrasah, guru, komite sekolah, dan masyarakat atau wali murid dalam penyusunan program sekolah. Perencanaan program sekolah²⁷ misalnya: program tahunan (jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek), visi, misi, dan tujuan dari lembaga sekolah

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah bersama guru, tenaga kependidikan, dan personel lainnya di sekolah dalam melakukan semua kegiatan manajerial untuk mewujudkan hasil yang direncanakan dengan menentukan hasil yang direncanakan dengan menentukan sasaran, menentukan struktur tugas, wewenang dan

²⁶ Muhammad Nur, *Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Dayah Gui Kabupaten Pidie, Vol. 4, No. 1*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Februari 2016), 99.

²⁷ Hanifah, *Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Mengengah Atas Negeri 3 Bireun Kabupaten Bireun*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 23 Mei 2015), 60.

tanggung jawab²⁸. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pembagian tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan perumusan perencanaan.²⁹

Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen yang dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya pengorganisasian tersebut supaya semua yang dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam tahap pengorganisasian hal yang harus ditentukan adalah siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melakukan, dan bagaimana sistem koordinasinya.³⁰

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Sagala menjelaskan berdasarkan seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Menggerakkan (*actuating*), berarti pemberian tugas kepada anggota anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat .

²⁸ Hamdi, Penerapan Fungsi Manajemen pada Kantor Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Jilid 6, No. 2, (Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ekonomi Pancasetia, 2 Juli 2020), 157.

²⁹ Samuel Betlajery, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kamung Tambat Kabupaten Merauke, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, (Merauke: Universitas Musamus, Oktober 2016), 139.

³⁰ Muktar Janan, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Swasta Kota Langsa*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019), 47.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan anggota organisasi atau lembaga yang berusaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan perumusan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. P. Sebagian berpendapat bahwa penggerakan adalah seluruh proses memberikan motivasi untuk bekerja kepada bawahan sehingga mereka mau bekerja secara iklas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³¹

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan manajemen sekolah adalah usaha sistematis menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sarannya guna sistem informasi umpan balik . Pengawasan adalah suatu kegiatan pengamatan apakah tindakan dilapangan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan ketentuan dan kebijakan yang berlaku supaya dapat mencapai tujuan dari organisasi. Terry merumuskan pengawasan sebagai proses menentukan apa yang harus dicapai yaitu melalui penetapan standar. Artinya untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam rencana.³²

Implementasi dalam penerapan MBS perlu adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya: pemberian pelatih kepada guru, bagaimana cara pengambilan keputusan, bagaimana cara dalam pemecahan masalah, dan lain-lain.

³¹ Halima dan Juwanti, *Melaksanakan fungsi manajemen dan Keemimpinan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lambandia*, (Kendari: Universitas Muhammadiyah, 2021), 5.

³² Rahmawati Sarurama dan Riki Amalia *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: cendekia Press, Agustus 2020), 2.

Penerapan MBS memiliki berbagai syarat yang harus ada, agar penerapan MBS dapat berjalan dengan baik:³³

- a. Penerapan MBS harus mendapatkan dukungan dari semua staf yang ada di sekolah.

Adanya dukungan tersebut yang didapat dari semua staf (sumber daya yang meliputi masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan).

- b. Penerapan MBS harus dijalankan secara bertahap.

Pelaksanaan MBS dapat melalui tiga tahap yaitu jangka pendek (tahun pertama sampai tahun ke tiga), jangka menengah (tahun keempat sampai tahun keenam), dan jangka panjang (setelah tahun ke enam). Pada tiga tahun pertama pihak sekolah dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pihak lembaga sekolah.

- c. Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pihak lembaga sekolah.

Adanya wewenang ini pihak sekolah dapat mengatur lebih leluasa mengenai kebijakan-kebijakan kebutuhan lembaga pendidik.

Menurut Suprihatin (2017), ada beberapa indikator keberhasilan implementasi MBS di sekolah yaitu: 1) efektifitas proses pembelajaran, 2) kepemimpinan sekolah yang kuat, 3) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, 4) sekolah memiliki kemandirian, 5) partisipasi warga sekolah dan masyarakat, 6) sekolah transparansi dan akuntabilitas, 7) sekolah memiliki

³³ Husaini Usma, *Manajemen, teori, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2013), 573.

kemauan untuk berubah, 8) sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan, 9) sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, 10) output adalah prestasi sekolah.

Adanya indikator tersebut sebagai dasar penilaian mengenai keberhasilan implementasi MBS. Sehingga, lembaga sekolah tidak atau kurang memiliki salah satu indikator dalam implementasi MBS maka lembaga pendidikan berhak mengevaluasi dan mengkaji ulang apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan.

